

## BAB I PENDAHULUAN



### 1.1. Latar Belakang

Relasi antara masyarakat dan karya sastra merupakan relasi yang kompleks. Setiap manusia merupakan bagian dari masyarakat, setiap manusia lahir dan berinteraksi dengan manusia lain. Interaksi ini mengakibatkan setiap manusia mengalami proses belajar dan sedimentasi dari bermacam-macam pengalaman sosial. Karya sastra menantang, mempertanyakan, dan mengkritik masyarakat. Menurut Toshiko Ellis (2009:119), membaca karya sastra Jepang berarti membaca pengalaman setiap penulis dan interpretasi multidimensional mereka terhadap masyarakat dan kebudayaan.

Pada awalnya, kesusastraan Jepang terbagi menjadi dua, yaitu sastra murni dan sastra populer. Ellis menyebutkan bahwa pembagian ini terbentuk berdasarkan penerimaan mereka dalam penjualannya, sastra murni untuk pembaca yang “dengan serius” menikmati sastra serta sastra populer yang untuk pembaca dengan skala lebih luas yang membaca demi mencari hiburan. Sastra populer dianggap memiliki konten yang lebih ringan sehingga dari perspektif ekonomis, penjualannya lebih banyak dibandingkan sastra murni (2009:119). Kajian sastra Jepang biasanya lebih banyak dipusatkan pada sastra murni karena mereka dipandang lebih bermutu, terutama dalam usaha memperbaiki dan memajukan masyarakat Jepang, namun hal ini lambat laun mulai mengalami

perubahan terutama setelah muncul penulis-penulis baru yang lahir sejak tahun 1980-an seperti Murakami Haruki dan Yoshimoto Banana yang melahirkan genre baru dalam dunia sastra Jepang, yang mengandung sifat-sifat dari sastra murni dan sastra populer sekaligus. Ellis menyebut genre baru ini “*in-between literature*” atau ‘*chuukan bungaku*’ (中間文学 ‘sastra poros tengah’) . Hal ini menyebabkan kaburnya batasan antara sastra murni dan sastra populer dalam kesusastraan Jepang. Muncul karya sastra yang mengkritik masyarakat Jepang tapi dalam waktu bersamaan dikemas dengan bahasa yang ringan.

Pada tahun 2006, terbit sebuah serial novel yang menjadi cukup populer di Jepang hingga dalam kurun waktu dua tahun sejak perilisan perdananya telah dicetak ulang sebanyak 23 kali. Serial ini berjudul *Toshokan Sensou* (『図書館戦争』 ‘Perang Perpustakaan’) . Ide dasar dari *Toshokan Sensou* berasal dari Deklarasi Kebebasan Perpustakaan (図書館の自由に関する宣言 ‘*Toshokan no Jiyuu ni Kansuru Sengen*’) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Perpustakaan Jepang (日本図書館協会 ‘*Nihon Toshokan Kyokai*’) (Arikawa, 2008a: 344-345).

Serial novel *Toshokan Sensou* terdiri dari empat buku ditambah dua buku berisi cerita sampingan. Empat buku tersebut ialah *Toshokan Sensou*, *Toshokan Nairan* (図書館内乱 ‘Pemberontakan Perpustakaan’), *Toshokan Kiki* (図書館危機 ‘Krisis Perpustakaan’), dan *Toshokan Kakumei* (図書館革命 ‘Revolusi Perpustakaan’), sementara dua buku sampingan tersebut masing-

masing berjudul *Bessatsu Toshokan Sensou I* (別冊図書館戦争 I ‘Perang Perpustakaan: Volume Tambahan I’) dan *Bessatsu Toshokan Sensou II* (別冊図書館戦争 II ‘Perang Perpustakaan: Volume Tambahan II’).

Secara umum, novel ini menceritakan seorang gadis bernama Kasahara Iku yang bekerja sebagai pegawai perpustakaan karena memiliki kecintaan yang besar terhadap buku serta terinspirasi oleh pegawai perpustakaan yang pernah menolongnya. Cerita bergulir pada awal masuknya Iku sebagai pegawai dalam Korps Perpustakaan hingga akhirnya ia menemukan pegawai idolanya dan menjalin hubungan hingga ke jenjang pernikahan. Serial ini tidak hanya populer, tetapi juga memperoleh penghargaan pertama untuk novel *entertainment* dalam Penghargaan *Hon no Zasshi* pada tahun 2006 dan Penghargaan *Seiun* untuk kategori *Long Fiction* pada tahun 2008 (<http://www.sf-fan.gr.jp/awards/2008result.html>). Serial novel ini juga turut diadaptasi menjadi serial animasi, *live action*, serta *manga*.

Secara sekilas, *Toshokan Sensou* tampak seperti novel percintaan biasa, namun bila dibaca lebih lanjut, keunikan *Toshokan Sensou* terletak pada latar cerita yang bersifat Jepang imajinatif atau *alternate universe*. Dalam periodisasi sejarah Jepang setelah keshogunan Tokugawa berakhir, yaitu tahun 1868, periode Jepang dibagi menjadi periode Meiji, Taishou, Shouwa, dan Heisei. Namun dalam *Toshokan Sensou*, periode Shouwa dilanjutkan oleh periode rekaan, yaitu periode Seika (正化). Bersamaan dengan munculnya periode baru itu, dalam

masyarakat Jepang tersebut diluncurkan undang-undang baru yang mengontrol media massa, Undang-Undang Reformasi Media (メディア良化法 '*Media Ryoukahou*'). Dampak dari undang-undang ini terasa langsung terhadap kebebasan berekspresi yang menjadi hak asasi setiap orang. Penyensoran menjadi salah satu hal yang umum terjadi dalam masyarakat. Terkait dengan penyensoran terdapat dua pihak besar yang saling bersaing untuk membentuk konsensus dari masyarakat Jepang, yaitu Korps Perpustakaan (図書隊 '*Toshotai*') dan Komite Reformasi Media (メディア良化委員会 '*Media Ryouka Iinkai*'). Korps Perpustakaan dalam serial ini digambarkan dengan berbeda dari institusi perpustakaan pada umumnya, yaitu adanya hak untuk menggunakan senjata api dalam rangka perlindungan diri dari penyensoran. Korps Perpustakaan dalam cerita ini dibentuk demi melindungi kebebasan intelektual lembaga perpustakaan seperti yang tertuang dalam Deklarasi Kebebasan Perpustakaan (<http://www.jla.or.jp/ibrary/gudeline/tabid/232/Default.aspx>.)

Korps Perpustakaan sebagai oposisi utama penyensoran sementara Komite Reformasi Media sebagai badan pelaksana penyensoran. Persaingan kedua pihak ini diwujudkan melalui pengendalian media dan penyensoran, atau bisa disebut juga pertikaian intelektual, yang dalam prosesnya terkadang melibatkan penggunaan senjata api. Persaingan terjadi demi mewujudkan tujuan masing-masing, yaitu masyarakat Jepang yang ideal. Melalui pertikaian

intelektual tersebut, tampak bahwa kedua kubu saling berusaha mendominasi satu sama lain.

Klimaks serial *Toshokan Sensou*, sekaligus klimaks persaingan kedua pihak ini terjadi dalam buku *Toshokan Kiki*. Dalam buku tersebut ditemukan permasalahan yang menyebabkan novel ini menjadi menarik untuk diteliti. Permasalahan pertama ialah hadirnya kisah percintaan yang romantis dan menghibur dalam serial *Toshokan Sensou* tetapi juga sekaligus pandangan mengenai masyarakat Jepang yang ideal bagi masing-masing pihak yang berseteru. Pada umumnya, novel bergenre romantis hanya berisi mengenai dinamika kehidupan percintaan antartokohnya, tetapi dalam serial novel ini, dua hal yang sangat berbeda, yaitu percintaan romantis serta konflik politik dan sosial, dihadirkan untuk diikuti dan dinikmati secara bersamaan oleh pembaca. Konflik sosial yang terjadi di dalam novel *Toshokan Kiki* cukup rumit sehingga menjadi menarik untuk diteliti, terutama pada proses dominasi yang terjadi.

Permasalahan kedua ialah pertikaian intelektual antara Korps Perpustakaan dan Komite Reformasi Media demi mewujudkan masyarakat Jepang yang ideal menurut kelompok masing-masing. Dalam pertikaian yang berlangsung dalam cerita tersebut, tampak adanya usaha dari kedua belah pihak untuk saling mendominasi satu sama lain dengan cara mendapatkan konsensus dari masyarakat mengenai masyarakat Jepang yang ideal. Dalam pertikaian dan usaha untuk memperebutkan kekuasaan, tentunya ada pihak yang mendominasi dan didominasi. Dalam serial ini, tampak adanya relasi kuasa yang berlangsung

di antara kedua pihak tersebut. Pertikaian terjadi melalui dua jalan, yaitu melalui kekerasan dan persetujuan.

Dengan kata lain, pertikaian yang terjadi dalam novel ini tidak semata-mata pertikaian fisik dengan menggunakan senjata saja, tetapi juga pertikaian yang memanfaatkan kepemimpinan moral dan intelektual demi mendapatkan persetujuan. Berdasarkan adanya masalah-masalah di atas, novel *Toshokan Kiki* ini menjadi menarik untuk diteliti menggunakan teori Hegemoni Gramsci.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan sejumlah konflik yang terdapat dalam novel *Toshokan Kiki*, dalam penelitian ini akan dikaji pokok-pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemetaan kelompok masyarakat dihadirkan dalam novel *Toshokan Kiki* karya Arikawa Hiro?
2. Bagaimanakah dominasi kekuasaan dihadirkan dalam novel *Toshokan Kiki* karya Arikawa Hiro?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap pemetaan kelompok masyarakat yang muncul dalam novel *Toshokan Kiki* berdasarkan teori hegemoni Gramsci.

2. Mengungkap dominasi kekuasaan yang muncul dalam novel *Toshokan Kiki* berdasarkan teori hegemoni Gramsci.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat memberikan sejumlah manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoretis: mengaplikasikan teori hegemoni Gramsci dalam mengkaji karya sastra Jepang, mengingat jumlah penelitian kesusastraan Jepang yang menggunakan teori ini nyaris tidak ada.
2. Manfaat praktis: memperkenalkan Arikawa Hiro serta memperluas wilayah kajian sastra Jepang yang selama ini dipenuhi dengan pengarang-pengarang klasik serta Kawabata Yasunari.

#### 1.5. Tinjauan Pustaka

Melalui penelusuran pustaka pada website artikel ilmiah online CiNii, terdapat tiga penelitian terdahulu yang menggunakan serial *Toshokan Sensou* sebagai objek penelitian. Penelitian pertama berjudul 「『図書館戦争』における非暴力的戦いについて考察」 (‘Analisis Pertarungan Tanpa Kekerasan dalam *Toshokan Sensou*’) oleh Tsuma Makoto. Penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal *The Library world (Quarterly Journal of the Japan Institution for Library Science* pada tahun 2008. Tsuma Makoto telah melakukan penelitian pada keempat buku

serial *Toshokan Sensou* dengan hasil yaitu identifikasi bentuk-bentuk perselisihan tanpa kekerasan yang terjadi dalam serial tersebut. Melalui penelitian tersebut, Touma juga menyatakan bahwa serial tersebut bukan sekadar novel hiburan belaka (Touma, 2008:3). Namun penelitian ini memiliki kekurangan, yaitu tidak adanya teori dan metode yang dipergunakan secara spesifik untuk menganalisis bentuk-bentuk perselisihan tanpa kekerasan yang terjadi dalam serial *Toshokan Sensou* sehingga analisis yang dihasilkan kurang mendalam.

Touma Makoto, Yane Junichi, dan Shihota Tsutomu juga telah melakukan penelitian lain dengan objek yang sama, yang kemudian dipublikasikan dalam bentuk artikel berjudul 「『図書館戦争』シリーズの表現に関する図書館情報学的考察」 (‘Analisis Serial *Toshokan Sensou* dari Sudut Pandang Ilmu Perpustakaan’). Penelitian ini menghasilkan perbandingan antara konsep lembaga perpustakaan yang ditampilkan dalam serial *Toshokan Sensou* dengan realita lembaga perpustakaan di Jepang. Melalui perbandingan tersebut, ditemukan sejumlah perbedaan, misalnya adanya hak untuk menggunakan senjata api bagi pegawai perpustakaan dalam serial tersebut, sementara dalam realitanya, lembaga perpustakaan tidak memiliki hak tersebut. Namun penelitian ini hanya mencakup dua volume awal, yaitu *Toshokan Sensou* dan *Toshokan Nairan* saja. Untuk *Toshokan Kiki* dan *Toshokan Kakumei*, Touma dkk. hanya disebutkan poin-poin konsep perpustakaan yang disebutkan dalam novel tersebut tanpa ada analisis lebih lanjut.



Penelitian kali ini memfokuskan pada latar masyarakat yang menjadi arena terjadinya dominasi kekuasaan antara Korps Perpustakaan dan Komite Reformasi Media. Dalam proses dominasi tersebut, terjadi sejumlah konflik yang melibatkan tokoh-tokoh di dalam *Toshokan Kiki*. Konflik yang berlangsung dalam novel terdiri dari kekerasan dan kesetujuan sehingga berdasarkan hal tersebut, penelitian kali ini akan memanfaatkan teori hegemoni Gramsci untuk menganalisis dominasi kekuasaan yang ada dalam novel *Toshokan Kiki*.

## 1.6. Landasan Teori

### 1.6.1. Sosiologi Sastra

Ricoeur (dalam Faruk, 2014:48) berpendapat bahwa karya sastra mengambil jarak dari situasi nyata yang menjadi lingkungan asal karya tersebut tercipta, tetapi karya sastra sebagai tulisan mampu melampaui situasi dan kondisi asal tersebut untuk memasuki situasi dan kondisi yang berada dalam ruang dan waktu yang berbeda. Karya sastra tidak mengacu pada dunia sosial yang nyata, melainkan pada dunia sosial yang mungkin. Hal ini membuat pembaca dari karya sastra tersebut untuk ditarik keluar dari situasi sosial kehidupannya sendiri dan mampu memberikan fungsi kritis pada karya sastra.

Istilah “sosiologi” pertama kali dicetuskan oleh Auguste Comte (Ritzer, 2012:16) yang dideskripsikan sebagai “ilmu yang mempelajari *social statics* (statika sosial atau struktur sosial yang ada) dan *social dynamics* (dinamika sosial atau perubahan sosial)”, sementara menurut Kurniawan (2012:4), sosiologi ialah

ilmu mengenai kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial yang menunjukkan interaksi sosial dalam suatu masyarakat. Sementara itu, sastra ia pandang sebagai manifestasi pikiran dan perasaan manusia yang dipicu oleh daya imajinasi dan fantasi kemudian diwujudkan melalui bahasa.

Sosiologi sastra pada hakikatnya, menurut Ratna (dalam Kurniawan, 2012:5), merupakan interdisiplin ilmu antara sosiologi dan sastra. Keduanya memiliki objek yang sama, yaitu manusia dan masyarakat, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar secara hakikat, yaitu sosiologi yang mengacu pada hal-hal yang terjadi saat ini (*das sein*), bukan pada hal yang seharusnya terjadi (*das sollen*), sementara sastra bersifat evaluatif, subjektif, dan imajinatif. Oleh karena itu, Ratna kemudian menyatakan bahwa sosiologi sastra ialah:

“(1) pemahaman terhadap karya sastra dengan mempertimbangkan aspek-aspek kemasyarakatan; (2) pemahaman terhadap totalitas karya sastra yang disertai aspek-aspek kemasyarakatan yang terkandung di dalamnya; (3) pemahaman terhadap karya sastra sekaligus hubungannya dengan masyarakat yang melatarbelakanginya; dan (4) hubungan dialektik antara sastra dan masyarakat.”

Objek utama dari pengkajian sosiologi sastra ialah karya sastra itu sendiri. Sosiologi digunakan sebagai pisau untuk mengupas fenomena-fenomena sosial yang ada di dalam karya sastra.

Sosiologi sastra dapat dipecah kembali secara spesifik berdasarkan teori sosiologi. Misalnya sosiologi sastra marxis, sosiologi sastra hegemoni gramsci, strukturalisme genetik, dan lain sebagainya. Penelitian ini menggunakan teori Hegemoni milik Antonio Gramsci.

### **1.6.2. Hegemoni Gramsci**

Hegemoni memiliki dua pengertian. Pengertian pertama ialah hegemoni sebagai suatu sikap yang dilakukan pemerintah pada suatu negara dalam mengkoordinasikan rakyat atau negara-negara bawahannya dengan tujuan untuk menjaga stabilitas pemerintahan; sementara pengertian kedua ialah suatu strategi konsensus dalam membangun aliansi yang dilakukan oleh rakyat sebagai kelas subordinat (bawah) dalam memperoleh dukungan dari kelas-kelas lainnya sebagai usaha untuk melakukan revolusi. Menurut Gramsci, hegemoni tidak terbatas pada politik, tetapi juga meliputi kebudayaan dan ideologi. Hal ini disebabkan revolusi tidak cukup untuk mengendalikan ekonomi dan aparatur negara dan perlu didapatkan kepemimpinan kultural atas aspek masyarakat lainnya (Ritzer, 2012:176).

#### **1.6.2.1. Konsep Dasar Hegemoni**

Antonio Gramsci merupakan salah satu pemikir marxis yang terkenal, terutama melalui kritiknya atas marxisme mengenai reduksionisme dan esensialisme. Reduksionisme dan esensialisme merujuk kepada kecenderungan para pemikir, baik pemikir marxisme maupun nonmarxisme, untuk mengerucutkan segala esensi menjadi suatu keberadaan tertentu yang dianggap

sebagai kebenaran mutlak. Salah satunya ialah determinisme ekonomi, yaitu pandangan bahwa superstruktur dalam masyarakat secara mutlak ditentukan oleh infrastruktur atau ekonomi. Hal ini mengakibatkan perjuangan kelas ikut tereduksi menjadi perjuangan dari kelas ekonomi saja, dengan mengabaikan perlawanan dari kelas sosial (Fakih dalam Simon, 2004:xiv).

Selain itu, menurut Fakih, Gramsci juga mengkritik kecenderungan para pemikir marxisme yang menganggap bahwa perubahan sosial dan revolusi merupakan proses yang terjadi secara linear (Simon, 2004:xv). Menurut Marx, sistem kapitalis akan dengan sendirinya runtuh ketika masyarakat telah mencapai titik kemerosotan terendah. Namun hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tersendiri menurut Ritzer dan Goodman (2012), yaitu “mengapa individu harus bertindak jika sistem kapitalis akan remuk karena kontradiksi struktural di dalam dirinya sendiri?” Gramsci melalui pemikirannya mencoba untuk memberikan perhatian pada faktor yang cenderung diabaikan oleh para pemikir marxisme, yaitu faktor manusia yang dituangkan pada gagasan mengenai negara dan masyarakat yang dihubungkan melalui konsep hegemoni.

Istilah hegemoni berasal dari bahasa Yunani ‘*eugemonia*’ yang merujuk pada dominasi kekuasaan kota (*polis*) secara independen (Hendarto dalam Kumiawan, 2012:71). Hegemoni diidentikkan sebagai bentuk kepemimpinan, misalnya kepemimpinan oleh suatu negara terhadap wilayah-wilayah yang lebih kecil di dalamnya. Istilah hegemoni memang identik dengan Antonio Gramsci, namun konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Plekanov dan para marxis

Rusia sebagai bagian dari strategi untuk meruntuhkan Tsarisme Rusia (Bocock, 2007:22). Strategi ini merujuk pada pandangan bahwa untuk meruntuhkan Tsarisme, kaum proletar harus membentuk suatu kepemimpinan hegemonik yang terdiri dari kaum petani, kritikus borjuis, dan kaum intelektual.

Hegemoni Gramsci yang menjadi konsep paling original dalam pemikirannya sebenarnya merupakan gagasan yang dihasilkan setelah mendapatkan strategi Plekanov dkk mendapat pengembangan dari Lenin yang turut bergerak dalam usaha meruntuhkan Tsarisme. Gagasan bahwa perjuangan kelas ekonomi bukan satu-satunya jalan menuju revolusi sudah pernah disebutkan Lenin melalui bukunya yang berjudul *What Is To Be Done? Burning Questions of Our Movement* karena ruang lingkup pergulatan ekonomi terlalu sempit (1978:78). Lenin mengungkapkan pentingnya kesadaran secara politik di kalangan pekerja dan buruh karena perjuangan ekonomi saja terlalu sempit. Gagasan ini kemudian berhasil dikembangkan oleh Gramsci menjadi strategi “perang posisi” dalam rangka “mencapai hegemoni bagi kaum proletar dalam masyarakat sipil” (Bocock, 2007:25), dan kemudian menurut Roger Simon dikembangkan lagi menjadi sebuah konsep mengenai hubungan antarkelas.

Penelitian ini menggunakan banyak kata hegemoni dan dominasi. Konsep dominasi dalam benak Gramsci cukup unik, yaitu ia mensyaratkan kepemimpinan (*leadership*) agar suatu kelompok sosial dapat memperoleh kekuatan pemerintahan.

*“A social group can, and indeed must already exercise ‘leadership’ before winning governmental power (this indeed is one of the principal conditions for winning of such power); it subsequently becomes dominant when it exercise power, but even if it holds it firmly in its grasp, it must continue to ‘lead’ as well.” (Gramsci, 1992:57-28)*

Dengan kata lain, suatu kelompok sosial selain menjalankan dominasi atas kelompok lain, ia juga harus mampu memimpin kelompok yang dikuasainya. Dalam penelitian ini, proses dominasi merujuk pada proses penguasaan suatu kelompok atas kelompok lain, tetapi proses tersebut belum sampai ke tahap kepemimpinan. Proses dominasi dimaknai sebagai proses yang dilakukan oleh suatu kelompok untuk menguasai kelompok lain. Proses dominasi melalui hegemoni berarti suatu kelompok berusaha menguasai kelompok lain dengan menjangking konsensus, persetujuan, dan kompromi dari kelompok lain.

#### **1.6.2.2. Masyarakat Sipil dan Negara**

Gramsci membedakan negara, masyarakat sipil, dan masyarakat politik. Masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam persaingan ideologi karena di dalamnya berbagai anggota masyarakat seperti para pekerja, pemilik modal, partai politik, lembaga keagamaan, dan kaum intelektual berjuang untuk memperoleh hegemoni. Masyarakat politik sebenarnya merupakan sebuah istilah yang digunakan Gramsci untuk merujuk pada hubungan-hubungan koersif yang berlangsung dalam tubuh aparat negara seperti militer, departemen administrasi, dan lain sebagainya. Kemudian Gramsci, seperti yang dikutip oleh Roger Simon, menyebutkan bahwa negara merupakan “suatu proses pembentukan dan

penggantian yang terus berlangsung akan keseimbangan yang tidak stabil” (2004:100–105).

### 1.6.2.3. Ideologi dan Kaum Intelektual

Gramsci (dalam Simon, 2004:83-91) menyatakan bahwa ideologi tidak hanya sekadar ide, melainkan pandangan atau cara hidup yang mengatur dan menjadi landasan bagi manusia dalam perjuangan mereka. karenanya, ideologi menjadi pondasi penting dalam membangun kesadaran moral dari kelas pekerja untuk bergerak. Ideologi memiliki agen-agennya sendiri dalam tugas melaksanakan reformasi moral dan intelektual, yaitu kaum intelektual. Menurut Gramsci, tidak ada ideologi yang benar atau salah, melainkan ideologi yang mampu untuk terus maju dan mempersatukan berbagai kelompok sosial yang berbeda-beda hingga menjadi satu kelas hegemonik.

Kaum intelektual memegang peranan penting dalam proses hegemonik dalam masyarakat sipil. Dalam tulisannya, Gramsci menuliskan “*All men are intellectuals, one could therefore say : but not all men have in society the function of intellectuals*” (1992:9). Lebih lanjut, Gramsci menjelaskan bahwa terlepas dari pekerjaan seseorang, setiap orang melakukan aktivitas intelektual karena sampai pada taraf tertentu, ia terlibat dalam proses penciptaan konsep mengenai dunia, menetapkan garis batas moralitas sehingga berdasarkan hal tersebut ia ikut serta dalam memodifikasi dan membawa pikiran baru terhadap orang-orang di sekitarnya.

Kaum intelektual merupakan wakil kelas dominan yang menjalankan dua fungsi dalam masyarakat, yaitu:

- 1) Persetujuan spontan yang diberikan oleh sebagian besar masyarakat karena adanya kedudukan sosial tinggi yang dimiliki oleh kaum intelektual.
- 2) Aparat negara yang memiliki kekuatan hukum untuk mendisiplinkan kelompok-kelompok yang “tidak setuju”, namun fungsi ini hanya dijalankan bila persetujuan spontan gagal diperoleh.

Secara garis besar, Gramsci membedakan kaum intelektual menjadi dua, yaitu kaum intelektual tradisional dan kaum intelektual organik. Gramsci menyebutkan adanya kaum intelektual tradisional dan vulgar yang merujuk pada penulis, filsuf, seniman, serta jurnalis yang mengklaim diri mereka sendiri sebagai kaum intelektual. Kaum intelektual dalam pandangan Gramsci tidak ditentukan semata-mata melalui pendidikan yang diperoleh, melainkan melalui fungsinya dalam masyarakat. Contoh anggota kaum intelektual tradisional lain yang cukup berpengaruh ialah kaum rohaniwan. Argumen Gramsci ini didasarkan pada ruang lingkup pergerakan mereka yang sempit, yaitu pada skala desa dan kota-kota kecil di daerah pinggiran. Mereka bergerak sebagai jembatan penghubung antara pengusaha dan pekerja, serta menjalankan program ekonomi yang telah dibuat oleh pengusaha sebelumnya. Mereka bertindak sebagai pelaksana, bukan organisator dari kaum kapitalis (Gramsci, 1978:14).



Sementara kaum intelektual organik menurut Gramsci bergerak dalam skala yang lebih luas. Menurutnya, kaum intelektual bukanlah sebuah kelas tersendiri dalam masyarakat, melainkan setiap kelas masyarakat membentuk kaum intelektualnya sendiri. Kaum intelektual tersebar dalam tiap lapisan kelas. Contoh kaum intelektual organik ialah para pemimpin Partai Moderat yang terdiri dari pemilik perusahaan, petani-petani kaya, pengusaha komersial dan industri, dan lain sebagainya. Jabatan mereka yang tinggi secara tidak langsung telah menarik perhatian dari pihak-pihak lain dalam masyarakat. Kemampuan intelektual mereka dimiliki melalui proses kondensasi yang terjadi selama mereka menjadi organisatoris para pekerja dan pemilik modal yang terlibat dalam bisnis mereka (Gramsci, 1978:60).

### **1.7. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dikonsentrasikan melalui pendekatan objektif, atau pendekatan yang menekankan pada analisis unsur-unsur dalam karya sastra itu sendiri (Ratna, 2009:73). Secara umum, penelitian ini dilaksanakan menurut langkah-langkah berikut:

1. Tahap penentuan dan pemahaman objek penelitian

Objek dari penelitian ini ialah novel *Toshokan Kiki* edisi *hard cover* yang diterbitkan oleh Media Works<sup>1</sup> pada tahun 2007. Buku ini tersusun atas lima bab dengan total 343 halaman.

## 2. Tahap pengumpulan dan pemahaman data

Data dalam penelitian ini berupa terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan data primer terdiri dari data tekstual berupa kutipan kata, ungkapan, dan kalimat yang didapatkan melalui proses pembacaan secara heuristik dan hermeneutik pada novel *Toshokan Kiki*, sementara data sekunder diperoleh dari data-data penunjuang yang diperoleh dari daftar referensi yang akan dikumpulkan oleh peneliti. Data yang telah diperoleh kemudian akan dicatat dan dianalisis berdasarkan langkah-langkah analisis sosiologi sastra hegemoni Gramsci.

## 3. Tahap analisis dan pemaknaan

Secara umum, dalam penelitian sosiologi sastra-objektif, langkah awal dalam penelitian ialah menganalisis struktur karya sastra, terutama tokoh, alur, dan latar, yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungkan acuan struktur sosial karya sastra dengan struktur sosial yang sebenarnya. Terkait dengan sosiologi sastra Hegemoni Gramsci, Kurniawan (2012) menyebutkan ada dua metode dalam menganalisis karya sastra. Metode pertama berlandaskan

---

<sup>1</sup> Sejak tahun 2008, berubah nama menjadi ASCII Media Works.

pemahaman bahwa sastra merupakan representasi ideologi kelas-kelas sosial yang menitikberatkan analisis pada proses hegemoni melalui perkembangan sastra dalam suatu kurun waktu tertentu. Penelitian sastra dengan pendekatan hegemoni bertujuan untuk menganalisis ideologi-ideologi yang berkembang dalam masyarakat melalui karya sastra.

Metode kedua menekankan pada analisis karya sastra yang dilihat dari aspek persoalan sosial hegemonik. Pada penelitian ini akan digunakan metode kedua karena penelitian ini bersifat objektif, atau memusatkan perhatian terhadap karya sastra itu sendiri secara independen. Berikut ialah langkah analisis sebagai berikut:

- 1) Identifikasi relasi kelas-kelas sosial, ataupun lembaga-lembaga sosial dan kaum intelektual yang muncul dalam karya sastra.
- 2) Identifikasi resistensi dan persoalan-persoalan sosial yang muncul.
- 3) Proses hegemoni dan/atau aliansi yang terjadi, ataupun negosiasi dan kompromi yang terjadi antar atau intrakelas sosial
- 4) Analisis terjadinya proses hegemoni.

### **1.8. Sistematik Penyajian**

Penelitian ini dilakukan dalam rangkaian sebagai berikut:

1. Bab I berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, batasan penelitian, rumusan penelitian, tujuan dan manfaat dari penelitian, tinjauan pustaka dari penelitian sebelumnya, landasan teori, metode penelitian yang akan dipakai, serta sistematik penyajian.
2. Bab II berupa identifikasi unsur-unsur dominasi kekuasaan yang membangun struktur novel *Toshokan Kiki*.
3. Bab III berisi pemetaan kelompok-kelompok yang ada dalam novel *Toshokan Kiki* dan proses dominasi yang terjadi.
4. Bab IV berisi kesimpulan analisis serta saran untuk penelitian berikutnya.